



2025

LAPORAN TAHUNAN

Menumbuhkan Perdamaian, Menjaga Keberlanjutan

Upaya memperbaiki iklim investasi dan daya saing daerah,
meningkatkan efisiensi layanan publik, serta mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat





LAPORAN TAHUNAN 2025

Menumbuhkan Perdamaian, Menjaga Keberlanjutan

Upaya memperbaiki iklim investasi dan daya saing daerah,
meningkatkan efisiensi layanan publik, serta mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat



Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	4
Laporan Tahunan CRU Indonesia 2025.....	4
Konteks	4
Pendekatan Intervensi	5
Sorotan Utama Program	5
Hasil Utama dan Pembelajaran yang Diperoleh	6
Relevansi Strategis dan Prospek.....	6
Pesan dari Ketua Badan Pengurus	7
Tentang CRU Indonesia	8
Sejarah Singkat.....	8
Mandat Organisasi	9
Bidang Utama Pekerjaan	9
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai	9
Posisi Strategis	9
Konteks Operasional 2025	10
Pilar Strategis 2025	11
Penyelenggara Penanganan Konflik.....	11
Penguatan Pengetahuan dan Metodologi	11
Pelibatan dan Kolaborasi Strategis	12
Penguatan Kelembagaan	12
Sorotan Program 2025	13
Mendukung Aksi Multi-Pihak untuk Menghormati Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal (Aceh)	13
Program Pengembangan Kapasitas Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HRDD)	18
Pelibatan dan Kolaborasi Strategis	19
Pengembangan Organisasi	21
Pemantauan, Pembelajaran, dan Refleksi	22
Tantangan dan Tanggapan Adaptif	22
Gambaran Umum Keuangan.....	23
Prospek Strategis 2026	24
Ucapan Terima Kasih	25
Lampiran	27
Lampiran 1. Daftar Kegiatan Tahun 2025.....	28
Lampiran 2. Laporan Keuangan	29



Daftar Gambar

Gambar 1. Diskusi kaukus masyarakat tentang keamanan tenurial Masyarakat Adat dan komunitas lokal	14
Gambar 2. Diskusi kaukus CSOs tentang keamanan tenurial Masyarakat Adat dan komunitas lokal.....	14
Gambar 3. Diskusi kaukus pemerintah tentang keamanan tenurial Masyarakat Adat dan komunitas lokal	14
Gambar 4. Diskusi kaukus perusahaan tentang keamanan tenurial Masyarakat Adat dan komunitas lokal.....	14
Gambar 5. Dialog Multi-pihak 1 di Kota Subulussalam. Pembukaan	14
Gambar 6. Dialog Multi-pihak 1 di Kota Subulussalam. Diskusi.....	14
Gambar 7. Dialog Multi-pihak 1 di Kota Subulussalam. Pembukaan	15
Gambar 9. Pelatihan Mediator Bersertifikat MA, Dolok Sanggul. Ujian akhir.....	15
Gambar 10. Diskusi kaukus Perusahaan tentang keamanan tenurial Masyarakat Adat dan komunitas lokal.....	15
Gambar 8. Diskusi kaukus CSOs tentang keamanan tenurial Masyarakat Adat dan komunitas lokal.....	15
Gambar 11. Pelatihan Analisis, Dokumentasi, dan Pelaporan Konflik bagi Staf Perusahaan Kelapa Sawit.....	16
Gambar 12. Pelatihan Lanjutan Penilai dan Mediator, Dolok Sanggul. Acara pembukaan.....	16
Gambar 13. Pelatihan Lanjutan Penilai dan Mediator, Dolok Sanggul. Simulasi	16
Gambar 14. Sosialisasi PIRK di Kabupaten Aceh Selatan	17
Gambar 15. Dasbor dan antarmuka pengguna PIRK.	17
Gambar 16. Pelatihan HRDD Angkatan Pertama, Bandung.....	18
Gambar 17. Pelatihan HRDD Angkatan Pertama, Bandung. Kerja kelompok.....	18
Gambar 18. Pelatihan Penerapan HRDD untuk AAL. Pembukaan	19
Gambar 19. Pelatihan Penerapan HRDD untuk AAL	19
Gambar 20. Pelatihan HRDD dan Mekanisme Pengaduan Keluhan, Bandung.....	19
Gambar 21. Pelatihan HRDD dan Mekanisme Pengaduan, Keluhan, Bandung. Ravin Khrisnan sedang bertugas.....	19
Gambar 22. Pertemuan Mitra Strategis ATR/BPN.	20
Gambar 23. Pertemuan Pengembangan Program bersama PKTHA.	20
Gambar 24. Pertemuan Koordinasi dengan Para Pemberi Dana IPLC selama RSPO 2025 di Kuala Lumpur. Sesi Tanya Jawab	20
Gambar 26. Smartseed yang diselenggarakan Sinarmas, Medan. Ginanjar mempresentasikan program CRU Indonesia.....	20
Gambar 25. Pertemuan Koordinasi dengan Para Pemberi Dana IPLC selama RSPO 2025 di Kuala Lumpur. Acara penutupan.....	20
Gambar 27. Yosigara dan Tim Swisscontact di Forum Bisnis NDPE, Medan.	20



Ringkasan Eksekutif

Laporan Tahunan CRU Indonesia 2025

Pada tahun 2025, Conflict Resolution Unit (CRU) Indonesia terus memperkuat perannya sebagai organisasi berbasis pengetahuan yang bekerja di persimpangan tata kelola lahan, hak asasi manusia, investasi berkelanjutan, dan pencegahan konflik. Di tengah meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim, ekspansi investasi berbasis lahan, serta dinamika tenurial yang semakin kompleks di berbagai wilayah Indonesia, CRU Indonesia mengembangkan dan menerapkan pendekatan praktis dalam pengelolaan dan pencegahan konflik lahan dan sumber daya alam melalui metodologi berbasis bukti, pelibatan multipemangku kepentingan, serta inisiatif penguatan kapasitas.

Laporan Tahunan ini menyajikan capaian utama CRU Indonesia sepanjang tahun, pembelajaran yang diperoleh, serta arah strategis ke depan, sebagai wujud komitmen organisasi terhadap akuntabilitas, kolaborasi, dan penguatan kelembagaan yang berkelanjutan.

Konteks

Transisi Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan komitmen iklim terus berlangsung di tengah lanskap yang ditandai oleh tumpang tindih klaim lahan, kesenjangan tata kelola, serta ketimpangan akses dalam proses pengambilan keputusan. Konflik yang melibatkan masyarakat lokal, Masyarakat Adat, institusi pemerintah, dan pelaku sektor swasta masih menjadi risiko signifikan bagi stabilitas sosial, keberlanjutan lingkungan, dan praktik investasi yang bertanggung jawab.

Pada saat yang sama, meningkatnya ekspektasi global terhadap kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) serta penerapan Human Rights Due Diligence (HRDD) turut membentuk ulang cara perusahaan beroperasi di sektor berbasis lahan seperti pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam. Dinamika ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi organisasi yang mampu menjembatani keahlian teknis, keterlibatan masyarakat, dan dialog kelembagaan.

Dalam konteks tersebut, CRU Indonesia memposisikan diri sebagai perantara yang netral dan terpercaya, mendukung para pemangku kepentingan dalam menangani risiko konflik secara konstruktif sekaligus memperkuat sistem pencegahan agar sengketa tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Pendekatan Intervensi

Sepanjang tahun 2025, CRU Indonesia menyusun kerangka kerja berdasarkan empat pilar strategis:

1. Penyelenggara Penanganan Konflik

CRU Indonesia merupakan lembaga konvener resolusi konflik yang netral, yang merancang dan mendukung proses mediasi serta dialog yang efektif, melakukan asesmen konflik, dan memperkuat kapasitas profesional. Didirikan pada tahun 2015 dan menjadi lembaga independen sejak 2024, fungsi strategis ini sementara dihentikan pada tahun 2025 sambil menunggu keberlanjutan pendanaan melalui pembentukan dana amanah (trust fund) khusus.

2. Penguatan Pengetahuan dan Metodologi

Pengembangan dan penerapan kerangka analisis konflik, pendekatan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (Human Rights Due Diligence/HRDD), serta metodologi pembangunan yang peka terhadap konflik, yang disesuaikan dengan konteks tata kelola lahan dan sumber daya alam di Indonesia.

3. Pelibatan dan Kolaborasi Strategis

Fasilitasi kemitraan antara lembaga pemerintah, pelaku sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk memperkuat mekanisme pengaduan, platform dialog, serta sistem peringatan dini.

4. Penguatan Kelembagaan

Konsolidasi internal yang bertujuan memperkuat tata kelola organisasi, sistem operasional, dan keberlanjutan jangka panjang di tengah keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Sorotan Utama Program

Fokus utama CRU Indonesia pada tahun 2025 adalah pelaksanaan Program Penguatan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Indigenous People and Local Community/IPLC) di Aceh, yang dilaksanakan bersama Proforest dan Earthworm Foundation. Program ini mendukung masyarakat lokal dan adat dalam memperkuat kapasitas mereka untuk terlibat secara konstruktif dalam proses tata kelola lahan serta berinteraksi dengan pelaku sektor swasta. Melalui dialog terfasilitasi, pengembangan kapasitas, dan pendekatan keterlibatan yang peka terhadap konflik, program ini berkontribusi pada peningkatan saling pengertian antar pemangku kepentingan serta pengurangan potensi risiko konflik dalam lanskap rantai pasok komoditas.

CRU Indonesia juga memperluas peran kepemimpinannya dalam mendorong penerapan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (Human Rights Due Diligence/HRDD) di sektor berbasis lahan di Indonesia. Sepanjang 2025, organisasi ini menyelenggarakan empat pelatihan HRDD: tiga pelatihan publik lintas perusahaan dengan peserta dari berbagai korporasi, serta satu pelatihan internal untuk PT Astra Agro Lestari. Pelatihan tersebut membekali para praktisi perusahaan dengan perangkat praktis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko hak asasi manusia dalam konteks operasional.

Program HRDD ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan sektor swasta akan panduan praktis yang selaras dengan standar internasional, termasuk Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Dengan menerjemahkan kerangka global ke dalam praktik yang relevan secara operasional, CRU Indonesia turut memperkuat praktik bisnis yang bertanggung jawab serta pendekatan pencegahan konflik.

Di luar inisiatif utama tersebut, CRU Indonesia juga memberikan dukungan teknis, melakukan riset, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan penguatan kapasitas yang berfokus pada resolusi konflik, tata kelola lahan berkelanjutan, dan pengembangan mekanisme pengaduan. Organisasi ini juga terus memperluas kemitraan strategis lintas sektor, memperkuat posisinya sebagai fasilitator tepercaya dalam mendorong penyelesaian masalah secara kolaboratif.

Hasil Utama dan Pembelajaran yang Diperoleh

Pengalaman sepanjang tahun 2025 kembali menegaskan sejumlah pelajaran penting:

- Pengelolaan konflik yang efektif memerlukan integrasi antara keahlian teknis, legitimasi sosial, dan kepercayaan terhadap lembaga.
- Kolaborasi multi-pemangku kepentingan secara signifikan meningkatkan keberlanjutan dan skalabilitas intervensi.
- Pendekatan preventif—terutama melalui Uji Tuntas HAM (HRDD) dan identifikasi dini konflik—lebih efektif dari segi biaya serta memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan penyelesaian sengketa yang bersifat reaktif.
- Ketahanan organisasi bergantung pada sistem internal yang kuat, perencanaan yang adaptif, serta kemitraan yang beragam.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan operasional, termasuk keterbatasan pendanaan dan sumber daya, CRU Indonesia menunjukkan kemampuan manajemen yang adaptif dengan memprioritaskan keterlibatan berdampak tinggi serta memperkuat model kolaborasi.

Relevansi Strategis dan Prospek

Kegiatan CRU Indonesia berkontribusi langsung pada berbagai prioritas pembangunan yang lebih luas, termasuk investasi yang bertanggung jawab, ketahanan iklim, perlindungan hak asasi manusia, serta tata kelola lahan yang inklusif. Dengan menangani risiko konflik sebagai hambatan struktural bagi pembangunan berkelanjutan, CRU Indonesia mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kepastian investasi.

Menatap tahun 2026, CRU Indonesia akan berfokus pada perluasan jangkauan kerja di lanskap berisiko tinggi, pendalaman kemitraan strategis dengan pemerintah dan sektor swasta, serta penguatan keberlanjutan kelembagaan melalui perbaikan sistem tata kelola dan diversifikasi sumber pendanaan.

CRU Indonesia tetap berkomitmen menjadi ruang pembelajaran, dialog, dan pengembangan solusi praktis—mendukung para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia untuk mentransformasi risiko konflik menjadi peluang bagi pembangunan yang adil dan berkelanjutan.





Pesan dari
Ketua Badan Pengurus

Tahun 2025 menjadi periode pembelajaran yang penting bagi CRU Indonesia. Di tengah dinamika pembangunan berbasis lahan yang semakin kompleks, kami menyaksikan secara langsung bahwa konflik tidak hanya muncul akibat perbedaan kepentingan, tetapi juga dipicu oleh kesenjangan komunikasi, ketidakpastian dan kerentanan tenurial, serta terbatasnya akses terhadap ruang dialog yang setara. Pengalaman ini menegaskan kembali bahwa pengelolaan konflik yang efektif memerlukan kehadiran pihak perantara yang dipercaya, proses yang inklusif, serta komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan.

Sepanjang tahun, tim CRU bekerja di berbagai konteks sosial dan wilayah geografis yang beragam. Kami menghadapi tantangan operasional nyata—mulai dari membangun kepercayaan antar pihak, menjaga netralitas dalam proses mediasi, hingga memastikan pembelajaran dari lapangan terdokumentasi secara sistematis dan dapat dibagikan secara lebih luas. Tantangan-tantangan tersebut bukanlah hambatan, melainkan pengingat bahwa penyelesaian konflik merupakan proses bertahap yang membutuhkan ketekunan bersama.

Kami semakin meyakini bahwa pendekatan pembangunan yang peka terhadap konflik bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan prasyarat mendasar bagi setiap inisiatif pembangunan. Ketika risiko sosial dipahami sejak dini dan masyarakat dilibatkan secara bermakna, peluang terciptanya pembangunan yang adil, stabil, dan berkelanjutan menjadi jauh lebih besar.

Ke depan, CRU Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan institusi pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal dan masyarakat adat. Kami percaya bahwa solusi yang berkelanjutan hanya dapat lahir melalui kemitraan yang dibangun atas dasar kesetaraan dan saling percaya.

Atas nama seluruh tim CRU Indonesia, kami menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh mitra dan pemangku kepentingan yang telah berjalan bersama kami sepanjang tahun ini. Kami menatap masa depan dengan optimisme—meyakini bahwa melalui dialog dan kolaborasi, konflik dapat menjadi jalan menuju perubahan yang lebih adil dan konstruktif.

Bogor, 31 Maret 2026


Arief Wicaksono

Sejarah Singkat

Conflict Resolution Unit (CRU) didirikan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan mekanisme pengelolaan konflik yang kredibel dan terstruktur dalam sektor pembangunan berbasis lahan di Indonesia. Ekspansi pesat industri sumber daya alam dan investasi tata guna lahan telah memunculkan dinamika sosial yang semakin kompleks, sehingga diperlukan pendekatan yang tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berorientasi pada pencegahan, kolaborasi, dan pengelolaan konflik berbasis sistem.

CRU Indonesia merupakan kelanjutan dari inisiatif CRU yang diluncurkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tahun 2015. Inisiatif ini lahir dari komitmen sektor swasta untuk berkontribusi dalam memperbaiki iklim investasi berbasis lahan sekaligus mendukung agenda nasional pembangunan berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan konflik ditempatkan sebagai elemen penting dalam tata kelola penggunaan lahan dan pembangunan yang bertanggung jawab.

Seiring meningkatnya kebutuhan akan lembaga yang lebih independen dan inklusif, pada 7 Februari 2024 CRU bertransformasi menjadi organisasi independen berbasis keanggotaan dengan nama CRU Indonesia. Transformasi ini memperkuat perannya sebagai platform kolaboratif lintas sektor yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, praktisi, dan sektor usaha.

Sejak berdiri, CRU Indonesia berkembang menjadi platform independen yang mendorong praktik mediasi, fasilitasi dialog, serta pengembangan pengetahuan guna mendukung keterlibatan konstruktif para pemangku kepentingan. Organisasi ini berupaya memperkuat proses berbasis kepercayaan agar konflik dapat ditangani secara transparan, adil, dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada peningkatan stabilitas sosial dan praktik investasi yang bertanggung jawab.

Tentang CRU Indonesia

Mandat Organisasi

Mandat CRU Indonesia adalah mendukung institusi pemerintah, pelaku sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam menerapkan pendekatan pembangunan yang peka terhadap konflik. Organisasi ini menyediakan bantuan teknis, penguatan kapasitas, serta layanan pengetahuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan konflik, mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia, dan mengurangi risiko sosial yang terkait dengan pembangunan berbasis lahan.

CRU Indonesia berperan sebagai lembaga yang netral dan independen, dengan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, mendorong kolaborasi multipihak, serta mengembangkan pembelajaran praktis yang bersumber dari pengalaman lapangan.

Bidang Utama Pekerjaan

CRU Indonesia melaksanakan mandatnya melalui empat bidang pekerjaan yang saling terkait:

- **Penanganan Konflik** – memfasilitasi dialog multipihak, asesmen konflik, serta proses mediasi yang berlandaskan prinsip netralitas dan inklusivitas.
- **Uji Tuntas Hak Asasi Manusia** – mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab melalui integrasi kerangka penilaian dan mitigasi risiko hak asasi manusia.
- **Tata Kelola Lahan Berkelanjutan** – mendorong sistem tata kelola lahan dan sumber daya alam yang adil, transparan, dan akuntabel.
- **Pengembangan Kapasitas** – memperkuat kompetensi para praktisi, institusi, dan pemangku kepentingan melalui pelatihan, pembelajaran terapan, serta inovasi metodologis.

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai

CRU Indonesia memandang pembangunan berbasis lahan dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung ketahanan iklim serta stabilitas sosial jangka panjang.

Misinya adalah memperkuat ekosistem pengelolaan konflik melalui peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan, penguatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi proses kolaboratif, serta pengembangan pengetahuan aplikatif untuk mendorong perbaikan kebijakan dan praktik.

Kerja CRU berlandaskan nilai-nilai utama independensi, netralitas, inklusivitas, akuntabilitas, dan pembelajaran berkelanjutan, guna memastikan kredibilitas dan kepercayaan di antara beragam kelompok pemangku kepentingan.

Posisi Strategis

CRU Indonesia memposisikan diri secara strategis sebagai:

- sebuah organisasi berbasis pengetahuan yang menghasilkan bukti dan pembelajaran praktis untuk mendukung perumusan kebijakan, praktik bisnis, serta sistem pengelolaan konflik;
- perantara tepercaya yang memungkinkan dialog konstruktif dan menjembatani berbagai kepentingan melalui fasilitasi yang netral dan imparial;
- penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta yang mendorong solusi bersama guna mengurangi risiko konflik sekaligus mendukung investasi dan pembangunan berkelanjutan; dan
- penggerak pendekatan sensitif konflik sebagai mekanisme pengamanan bagi berbagai inisiatif terkait pembangunan berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penguatan kepastian tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal, serta pembiayaan hijau.

Melalui pendekatan ini, CRU Indonesia turut berkontribusi dalam memperkuat tata kelola lahan yang bertanggung jawab, mengurangi risiko konflik sosial, serta mendorong jalur pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Konteks Operasional 2025

Tata kelola lahan dan sumber daya alam di Indonesia terus berkembang dalam lingkungan operasional yang kompleks dan dinamis. Selama dua dekade terakhir, ekspansi sektor berbasis lahan—terutama kehutanan, perkebunan, dan industri intensif sumber daya—diiringi dengan meningkatnya sengketa terkait tenurial lahan dan akses terhadap sumber daya alam. Konflik ini kerap melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat, institusi pemerintah, serta pelaku usaha, sehingga sulit diselesaikan melalui mekanisme konvensional. Jika tidak ditangani, konflik tersebut dapat menimbulkan biaya sosial, lingkungan, dan ekonomi yang signifikan, mengganggu operasional bisnis, serta melemahkan tujuan pembangunan jangka panjang.

Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi tekanan yang semakin besar terkait transisi iklim global. Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, perlindungan hutan, dan promosi tata guna lahan berkelanjutan membentuk kembali ekspektasi terhadap pengelolaan pembangunan berbasis lahan. Kebijakan iklim dan komitmen keberlanjutan membuka peluang baru, namun juga menambah kompleksitas dalam tata kelola lahan. Klaim penggunaan lahan yang saling bersaing—untuk konservasi, mitigasi perubahan iklim, produksi, dan penghidupan masyarakat—berpotensi memperkuat ketegangan yang sudah ada apabila tidak dikelola melalui proses yang inklusif dan transparan.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, sektor bisnis juga menghadapi peningkatan perhatian terhadap kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Rantai pasok global, investor, dan kerangka regulasi semakin menuntut perusahaan untuk menunjukkan praktik pengelolaan lahan yang bertanggung jawab serta mekanisme penanganan keluhan yang efektif. Dengan demikian, konflik lahan tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lokal, melainkan juga sebagai risiko material yang memengaruhi stabilitas investasi, keberlanjutan operasional, dan reputasi perusahaan.

Dalam konteks ini, kebutuhan akan mekanisme yang kredibel dan efektif untuk mencegah serta mengelola konflik lahan dan sumber daya alam menjadi semakin mendesak. Pendekatan yang hanya mengandalkan jalur hukum atau konfrontatif sering kali tidak mampu menjawab kepentingan mendasar para pihak maupun menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis dialog dan kolaborasi—khususnya melalui mediasi—menawarkan alternatif dengan memungkinkan para pemangku kepentingan bersama-sama merumuskan solusi yang adil, praktis, dan dapat diterima oleh semua pihak.

Kerja CRU Indonesia berakar pada dinamika tersebut. Dibentuk untuk mendukung mediasi konflik penggunaan lahan dan sumber daya alam serta memperkuat kepercayaan terhadap mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang efektif, CRU Indonesia mendorong pendekatan pembangunan berbasis lahan yang sensitif terhadap konflik. Melalui layanan seperti asesmen konflik, dukungan fasilitasi, pengembangan pengetahuan, dan penguatan kapasitas, CRU Indonesia berkontribusi dalam meningkatkan cara konflik dipahami, dicegah, dan diselesaikan.

Di tengah tantangan tata kelola lahan yang semakin kompleks, peran CRU Indonesia tetap sangat relevan. Dengan mendorong dialog konstruktif antar pemangku kepentingan dan mempromosikan sistem yang mampu mengelola risiko konflik sejak dini, CRU Indonesia berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih stabil, memperkuat kepastian tenurial bagi masyarakat, serta mendukung pengelolaan lahan dan sumber daya alam di Indonesia yang adil dan berkelanjutan.



Sebagai respons terhadap semakin kompleksnya tata kelola lahan dan sumber daya alam di Indonesia, CRU Indonesia menata pelaksanaan kerjanya pada tahun 2025 ke dalam empat pilar strategis yang saling terhubung: penguatan pengetahuan dan metodologi, perluasan keterlibatan serta kolaborasi strategis, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Ketiga pilar ini menjadi arah utama organisasi dalam mendorong pendekatan yang peka terhadap konflik sekaligus meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik berbasis mediasi.

Penyelenggara Penanganan Konflik

Lembaga penyelenggara (convener) penanganan konflik adalah institusi yang netral dan independen yang menyediakan dukungan terpercaya untuk menangani konflik yang kompleks. Alih-alih selalu berperan sebagai mediator langsung, CRU Indonesia berfokus memastikan bahwa proses mediasi dan dialog dirancang serta dijalankan sesuai praktik terbaik. Dalam peran ini, CRU bertindak sebagai arsitek proses—memfasilitasi asesmen konflik awal, mendukung proses mediasi dan fasilitasi, serta memantau pelaksanaan kesepakatan para pihak. Banyak proses perdamaian gagal bukan karena mediasi tidak efektif, melainkan karena desain prosesnya kurang tepat.

Beroperasi dalam kerangka regulasi nasional, convener perlu menavigasi dinamika kebijakan dan ketidakpastian regulasi yang kerap membentuk konflik agraria dan sumber daya alam. Hal ini menuntut kemampuan untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan institusi pemerintah sekaligus menjembatani kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Selain itu, CRU juga berperan dalam memperkuat ekosistem profesional resolusi konflik melalui pengelolaan pool asesor dan mediator, serta penyelenggaraan pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan kapasitas profesional. Dalam konteks ini, convener juga berfungsi sebagai platform pengembangan talenta bagi profesi resolusi konflik.

Didirikan pada tahun 2015 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan dukungan UK Aid, CRU dirancang untuk menunjukkan nilai strategis pendekatan Alternative Dispute Resolution (ADR)—

khususnya mediasi—dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam. Sejak menjadi organisasi independen pada Februari 2024 dengan nama CRU Indonesia, peran convener tetap menjadi pilar strategis. Namun, untuk menjaga independensi dan imparialitas, fungsi ini akan dibiayai melalui mekanisme dana Amanah (trust fund) khusus yang saat ini sedang dikembangkan. Oleh karena itu, program convener tidak dilaksanakan pada tahun 2025 dan direncanakan kembali berjalan setelah pendanaan berkelanjutan berhasil diamankan.

Penguatan Pengetahuan dan Metodologi

Prioritas utama CRU Indonesia adalah pengembangan berkelanjutan pengetahuan dan perangkat metodologis untuk mendukung pengelolaan konflik yang efektif. Memahami akar penyebab, dinamika, serta para pihak yang terlibat dalam konflik lahan dan sumber daya alam menjadi kunci dalam merancang respons yang tepat. Melalui riset, dokumentasi kasus, dan kerja analitis, CRU Indonesia mengembangkan kerangka analisis konflik yang membantu para praktisi dan pemangku kepentingan memahami dimensi struktural maupun relasional konflik secara lebih komprehensif. Produk pengetahuan ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas praktik mediasi dan resolusi konflik di Indonesia.

Sejalan dengan itu, CRU Indonesia semakin mengintegrasikan pendekatan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (Human Rights Due Diligence/HRDD) dalam kerja sama dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan HRDD mendorong perusahaan dan institusi untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, serta menangani potensi dampak terhadap hak asasi manusia yang timbul dari kegiatan operasional mereka. Dengan menghubungkan analisis risiko konflik dan pertimbangan hak asasi manusia, CRU Indonesia mendukung praktik pembangunan berbasis lahan yang lebih bertanggung jawab dan akuntabel.

Fokus metodologis penting lainnya adalah promosi pembangunan yang peka terhadap konflik (conflict-sensitive development). Inisiatif pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan lahan dan sumber daya alam, berpotensi memperburuk

CRU Indonesia turut berkontribusi dalam pengembangan dan penguatan mekanisme pengaduan serta sistem peringatan dini.



ketegangan apabila risiko konflik tidak dikenali secara memadai. Oleh karena itu, CRU Indonesia mendorong pendekatan yang mengintegrasikan kesadaran konflik ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Melalui identifikasi risiko sejak dini serta fasilitasi dialog konstruktif antar pemangku kepentingan, pendekatan ini dapat membantu mencegah sengketa sekaligus mendorong hasil pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pelibatan dan Kolaborasi Strategis

Penanganan konflik lahan dan sumber daya alam memerlukan kerja sama lintas sektor dan lintas institusi. Oleh karena itu, CRU Indonesia memprioritaskan keterlibatan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, pelaku sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, institusi akademik, serta masyarakat lokal.

Kemitraan lintas sektor menjadi kunci untuk membangun pemahaman bersama dan mendorong aksi kolektif dalam mengelola risiko konflik. Melalui berbagai inisiatif kolaboratif, CRU Indonesia menjembatani perbedaan perspektif antar pemangku kepentingan yang sering kali bekerja dalam kerangka kelembagaan dan prioritas yang berbeda. Kemitraan ini juga membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman praktis, sehingga memperkuat ekosistem pengelolaan konflik secara keseluruhan di Indonesia.

Selain itu, CRU Indonesia turut berkontribusi dalam pengembangan dan penguatan mekanisme pengaduan serta sistem peringatan dini. Mekanisme pengaduan yang efektif menyediakan saluran bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Sementara itu, sistem peringatan dini memungkinkan institusi mendeteksi potensi ketegangan sejak awal dan merespons secara proaktif. Melalui dukungan terhadap mekanisme ini, CRU Indonesia berupaya mendorong tata kelola pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang lebih responsif dan akuntabel.

Penguatan Kelembagaan

Pilar strategis keempat berfokus pada penguatan CRU Indonesia sebagai lembaga yang kredibel, profesional, dan berkelanjutan. Sebagai organisasi yang berkomitmen mendukung proses mediasi serta meningkatkan praktik penyelesaian konflik, kapasitas kelembagaan menjadi fondasi utama untuk memastikan dampak jangka panjang.

Konsolidasi organisasi tetap menjadi langkah penting pasca transformasi kelembagaan CRU Indonesia menjadi asosiasi independen berbasis keanggotaan. Proses ini mencakup penguatan struktur tata kelola, penegasan peran dan tanggung jawab organisasi, serta penyelarasan dengan rencana strategis jangka panjang.

Tata kelola internal juga menjadi fokus utama. CRU Indonesia terus memperkuat sistem dan prosedur internal guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam operasionalnya. Sistem tata kelola yang kuat tidak hanya mendukung pelaksanaan program secara efektif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan mitra, pemangku kepentingan, dan para penerima manfaat.

Ke depan, CRU Indonesia menempatkan perencanaan keberlanjutan sebagai prioritas penting. Upaya ini meliputi pengembangan strategi program jangka panjang, perluasan jejaring dan kemitraan, serta penguatan kapasitas organisasi dalam merespons tantangan yang terus berkembang dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam.

Komponen krusial lainnya adalah penguatan pembiayaan yang mandiri dan berkelanjutan. Diversifikasi sumber pendanaan serta pengembangan model operasional yang tangguh secara finansial akan memungkinkan CRU Indonesia menjaga independensinya sekaligus terus menyediakan layanan berkualitas tinggi dalam analisis konflik, dukungan mediasi, riset, dan penguatan kapasitas.

Melalui keempat pilar strategis tersebut, CRU Indonesia berupaya memperkuat kontribusinya dalam mencegah dan menyelesaikan konflik lahan dan sumber daya alam. Dengan mengombinasikan inovasi metodologis, kolaborasi multipihak, dan ketahanan kelembagaan, CRU Indonesia terus mendorong terwujudnya tata kelola lahan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Sorotan Program 2025

Pada tahun 2025, CRU Indonesia semakin memperkuat kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional. Kolaborasi ini memperluas jejaring strategis CRU Indonesia sekaligus membuka lebih banyak peluang untuk mendorong keterlibatan konstruktif dalam penanganan konflik lahan dan sumber daya alam. Melalui kemitraan tersebut, CRU Indonesia terus menjalankan peran penting sebagai fasilitator yang netral—mendukung dialog, membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan, serta mempromosikan pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik dan tata kelola lahan yang bertanggung jawab.

Mendukung Aksi Multi-Pihak untuk Menghormati Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal (Aceh)

Mitra: Proforest dan Earthworm Foundation

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu pemasok utama komoditas pertanian dan kehutanan di tingkat global, termasuk kelapa sawit. Namun, konflik lahan dan sumber daya alam yang melibatkan perusahaan, Masyarakat Adat, serta Masyarakat Lokal (IPLCs) masih menjadi tantangan yang berkelanjutan. Konflik ini kerap dipicu oleh tumpang tindih klaim lahan, ketidaksinkronan sistem tata ruang dan perizinan, serta terbatasnya pengakuan historis terhadap hak-hak atas tanah adat.

Meskipun banyak perusahaan telah berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan standar lingkungan dalam rantai pasoknya, penyelesaian konflik lahan tetap kompleks. Mekanisme pengaduan perusahaan umumnya bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mampu mengatasi akar penyebab sistemik sengketa. Selain itu, perusahaan di hilir rantai pasok sering kali berjarak dari komunitas yang terdampak langsung, sehingga keterlibatan yang efektif menjadi lebih sulit dilakukan.

Tujuan

Inisiatif ini bertujuan memperkuat aksi kolaboratif dalam menangani tantangan hak atas tanah yang dihadapi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLCs) di lanskap produksi pertanian. Program ini berfokus pada peningkatan dialog antar pemangku kepentingan, dukungan terhadap upaya penyelesaian konflik, serta pengembangan pendekatan praktis untuk mencegah terjadinya konflik di masa depan.

Pendekatan dan Kegiatan Utama

Inisiatif ini menggabungkan dialog di tingkat nasional dengan kegiatan percontohan di tingkat lanskap. Namun, peran CRU Indonesia dan Earthworm Foundation berfokus pada pelaksanaan di tingkat lanskap, dalam hal ini di Provinsi Aceh yang mencakup Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan di tingkat lanskap diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan serta konsultasi untuk memahami secara lebih mendalam hambatan dalam penanganan konflik lahan dan mengidentifikasi peluang kolaborasi antara instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, dan perusahaan.

Di tingkat lanskap, program ini mendukung pemetaan konflik serta memfasilitasi sesi peningkatan pemahaman bagi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah guna membangun kesamaan perspektif mengenai tantangan hak atas lahan. Forum dialog multipihak juga diselenggarakan untuk mengidentifikasi solusi dan menyusun peta jalan penanganan konflik yang berbasis pada inisiatif lokal. Selain itu, kegiatan penguatan kapasitas—termasuk pelatihan mediasi dan asesmen konflik—dilaksanakan untuk memperkuat keahlian para pihak di tingkat lokal dalam mengelola konflik lahan dan sumber daya alam.

Relevansi Strategis

Dengan memperkuat dialog, kapasitas mediasi, dan pemecahan masalah secara kolaboratif, inisiatif ini berkontribusi pada terciptanya rantai pasok yang lebih bertanggung jawab serta tata kelola lahan dan sumber daya alam yang lebih baik. Program ini juga memperkuat peran CRU Indonesia sebagai pihak penghubung tepercaya dalam memfasilitasi keterlibatan konstruktif antara masyarakat, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah guna mencegah serta menyelesaikan konflik lahan.

Capaian

1. Dokumentasi Perspektif Pemangku Kepentingan

Antara Juni hingga Agustus 2025, program ini mendokumentasikan perspektif para pemangku kepentingan utama—termasuk pemerintah daerah, pelaku sektor swasta, masyarakat adat dan komunitas lokal, serta organisasi masyarakat sipil—terkait isu keamanan tenurial dan peluang kolaborasi untuk menghormati serta melindungi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Proses dokumentasi ini bertujuan menangkap beragam pandangan, mengidentifikasi titik temu dan perhatian bersama, serta menyediakan dasar bukti bagi dialog. Temuan tersebut menjadi masukan utama dalam pelaksanaan Multi-Stakeholder Dialogue (MSD) di Kota Subulussalam pada 25 September 2025.



Gambar 1. Diskusi kaukus masyarakat tentang keamanan tenurial Masyarakat Adat dan komunitas lokal



Gambar 2. Diskusi kaukus CSOs tentang keamanan tenurial Masyarakat Adat dan komunitas lokal



Gambar 3. Diskusi kaukus pemerintah tentang keamanan tenurial Masyarakat Adat dan komunitas lokal



Gambar 4. Diskusi kaukus perusahaan tentang keamanan tenurial Masyarakat Adat dan komunitas lokal



Gambar 5. Dialog Multi-pihak 1 di Kota Subulussalam. Pembukaan



Gambar 6. Dialog Multi-pihak 1 di Kota Subulussalam. Diskusi

2. Pelatihan Peka Konflik

Pelatihan Peka Konflik selama lima hari dilaksanakan pada 8-12 September 2025 di Hotel Gemma, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pelatihan ini diikuti oleh 19 peserta (5 perempuan dan 14 laki-laki) yang mewakili Masyarakat Adat dan komunitas lokal, institusi pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil dari Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan ini memperkenalkan konsep dasar, nilai, dan prinsip utama pendekatan sensitif konflik dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam. Pelatihan juga menekankan pentingnya mengintegrasikan pendekatan tersebut dalam praktik pengelolaan lahan guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta mengurangi risiko konflik sosial.

3. Pelatihan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung

Berdasarkan Pelatihan Peka Konflik yang telah dilaksanakan, sebanyak 15 peserta (3 perempuan dan 12 laki-laki) terpilih untuk mengikuti Pelatihan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung selama lima hari yang diselenggarakan di Coffee Hotel Akasi Dolok Sanggul (CHADS) pada 27 September hingga 1 Oktober 2025. Pelatihan ini mengacu pada kurikulum resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan membekali peserta dengan pengetahuan dasar serta keterampilan praktis dalam teknik mediasi. Selain itu, program ini juga menekankan standar etika, profesionalisme, dan prinsip imparialitas yang harus dijunjung mediator dalam memfasilitasi proses penyelesaian sengketa.



Gambar 7. Dialog Multi-pihak 1 di Kota Subulussalam. Pembukaan



Gambar 8. Diskusi kaukus CSOs tentang keamanan tenurial Masyarakat Adat dan komunitas lokal



Gambar 9. Pelatihan Mediator Bersertifikat MA, Dolok Sanggul. Ujian akhir



Gambar 10. Diskusi kaukus Perusahaan tentang keamanan tenurial Masyarakat Adat dan komunitas lokal

4. Pelatihan Analisis, Dokumentasi, dan Pelaporan Konflik bagi Karyawan Perusahaan

Pelatihan Analisis Konflik, Dokumentasi, dan Pelaporan selama dua hari telah dilaksanakan pada 2-3 Februari 2026 di Hotel Royal Bogor, Bogor, dengan melibatkan 21 peserta (7 perempuan dan 14 laki-laki) yang berasal dari perusahaan perkebunan (growers) dan pembeli perantara. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas peserta dalam mendokumentasikan dan melaporkan konflik lahan serta sumber daya alam secara sistematis sebagai bagian dari praktik bisnis yang bertanggung jawab dan tata kelola perusahaan yang baik di sektor kelapa sawit. Kegiatan ini semula dijadwalkan pada Desember 2025, namun ditunda akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.



Gambar 11. Pelatihan Analisis, Dokumentasi, dan Pelaporan Konflik bagi Staf Perusahaan Kelapa Sawit



Gambar 12. Pelatihan Lanjutan Penilai dan Mediator, Dolok Sanggul. Acara pembukaan



Gambar 13. Pelatihan Lanjutan Penilai dan Mediator, Dolok Sanggul. Simulasi

5. Pelatihan Lanjutan Asesmen dan Mediasi dalam Lahan dan Sumber Daya Alam

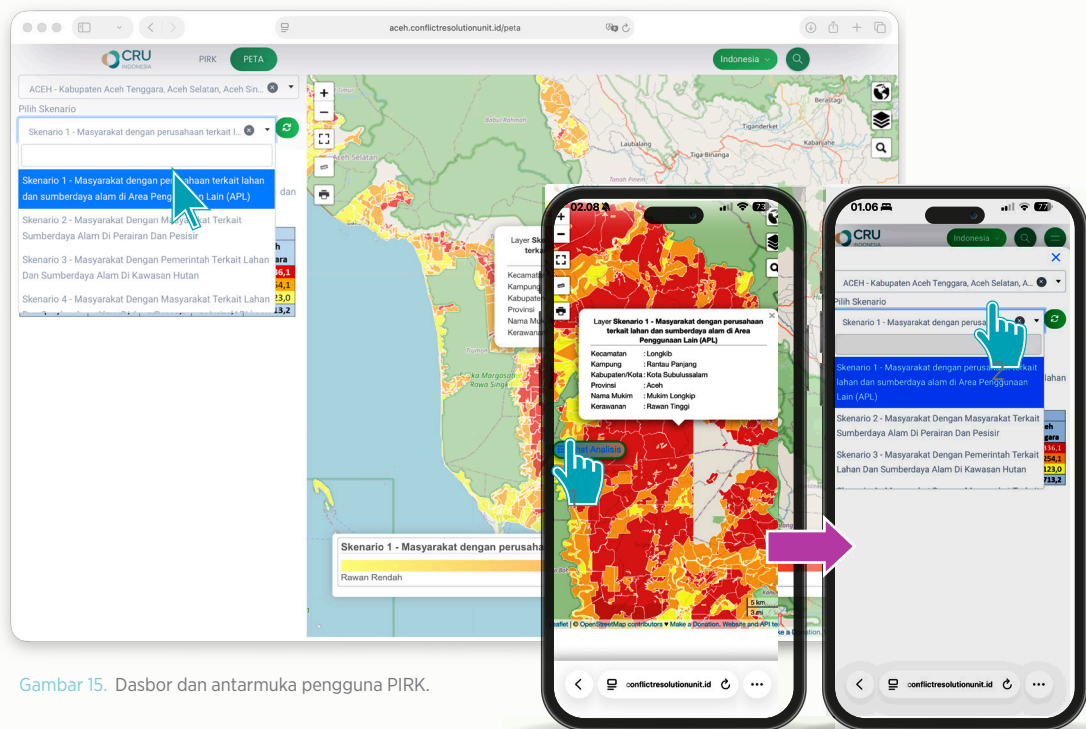
Pelatihan Lanjutan Asesmen dan Mediasi Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam dilaksanakan pada 5-9 Februari 2026 di Coffee Hotel Akasi Dolok Sanggul (CHADS). Pelatihan ini diikuti oleh 10 peserta terpilih (3 perempuan dan 7 laki-laki) yang sebelumnya telah mengikuti Pelatihan Peka Konflik serta Pelatihan Mediator Bersertifikat MA. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas praktis peserta dalam pengelolaan konflik, mencakup analisis dan dokumentasi kasus, metodologi asesmen konflik, serta proses mediasi, dengan fokus khusus pada sengketa lahan dan sumber daya alam. Pelatihan yang semula dijadwalkan pada November-Desember 2025 ditunda akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

6. Penyusunan Peta Indikatif Rawan Konflik (PIRK) untuk Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Konflik lahan dan sumber daya di Indonesia tetap menjadi hambatan utama bagi pembangunan berkelanjutan, dipicu oleh klaim yang tumpang tindih dan ketidakpastian status kepemilikan. Di wilayah barat daya Aceh, Proforest, CRU Indonesia, dan Earthworm Foundation mengembangkan Peta Indikatif Risiko Konflik (PIRK) untuk memprediksi dan mencegah sengketa. Dengan mengintegrasikan analisis spasial, data konflik, dan masukan pemangku kepentingan, PIRK memperkuat tata kelola, kepastian investasi, dan keamanan tenurial melalui aksi terkoordinasi lintas pemangku kepentingan.



Gambar 14. Sosialisasi PIRK di Kabupaten Aceh Selatan



Gambar 15. Dasbor dan antarmuka pengguna PIRK.

Program Pengembangan Kapasitas Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HRDD)

Pada tahun 2025, CRU Indonesia memperluas upayanya dalam memperkuat tata kelola lahan dan sumber daya alam yang bertanggung jawab melalui serangkaian program peningkatan kapasitas Human Rights Due Diligence (HRDD) bagi sektor swasta. Sepanjang tahun tersebut, empat program pelatihan telah diselenggarakan, terdiri dari dua pelatihan umum lintas perusahaan, satu pelatihan lintas perusahaan khusus sektor kelapa sawit yang dilaksanakan bersama Palm Oil Collaboration Group (POCG), serta satu pelatihan internal (in-house training) bagi PT Astra Agro Lestari.



Gambar 16. Pelatihan HRDD Angkatan Pertama, Bandung

Program ini bertujuan memperkuat penerapan HRDD di sektor berbasis lahan dan sumber daya alam sekaligus mendukung perusahaan dalam menyelaraskan praktik bisnis mereka dengan standar internasional yang diakui secara luas, termasuk United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dan OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Seiring meningkatnya tuntutan pasar global dan kerangka regulasi terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, penguatan kapasitas praktis untuk mengoperasionalkan HRDD menjadi prioritas strategis bagi perusahaan.

Pelatihan dirancang dengan pendekatan yang praktis dan interaktif. Peserta terlibat dalam pembelajaran berbasis studi kasus, mempelajari berbagai alat untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko hak asasi manusia, serta mendiskusikan strategi integrasi HRDD ke dalam sistem operasional perusahaan. Perhatian khusus

diberikan pada penguatan kemampuan perusahaan dalam mengantisipasi dan menangani konflik terkait lahan dan sumber daya alam melalui pendekatan pencegahan dan berbasis risiko.

Program ini menghadirkan beragam pakar dan praktisi. Sesi pelatihan melibatkan kontribusi Patricia Rinwigati dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai pakar HRDD; Ravin Khrisnan, spesialis mekanisme pengaduan dan mantan pejabat Roundtable on Sustainable Palm Oil; Arief Wicaksono yang memimpin sesi identifikasi dan analisis risiko HAM; serta Ilya Moeliono yang memfasilitasi diskusi mengenai pemantauan dampak HAM dan penilaian risiko.

Melalui rangkaian pelatihan ini, perusahaan peserta menunjukkan peningkatan pemahaman praktis mengenai implementasi HRDD serta penguatan kapasitas dalam menerapkan pendekatan preventif terhadap pengelolaan konflik. Program ini juga mendorong integrasi prinsip bisnis yang bertanggung jawab ke dalam kebijakan dan praktik operasional perusahaan.

Secara strategis, inisiatif ini semakin memperkuat posisi CRU Indonesia sebagai penyedia keahlian HRDD terdepan di Indonesia, khususnya pada sektor-sektor yang berada di persimpangan antara isu tenurial lahan, pengelolaan sumber daya alam, dan hak-hak masyarakat dalam operasi bisnis. Melalui dukungan terhadap penguatan sistem uji tuntas HAM perusahaan, CRU Indonesia berkontribusi pada pengurangan risiko konflik sekaligus mendorong tata kelola lahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 17. Pelatihan HRDD Angkatan Pertama, Bandung. Kerja kelompok



Gambar 18. Pelatihan Penerapan HRDD untuk AAL. Pembukaan



Gambar 19. Pelatihan Penerapan HRDD untuk AAL



Gambar 20. Pelatihan HRDD dan Mekanisme Pengaduan Keluhan, Bandung



Gambar 21. Pelatihan HRDD dan Mekanisme Pengaduan, Keluhan, Bandung. Ravin Khrisnan sedang bertugas

Pelibatan dan Kolaborasi Strategis

Pada tahun 2025, CRU Indonesia memperkuat kemitraan kelembagaan untuk mendorong pendekatan kolaboratif dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam serta penyelesaian konflik. Upaya strategis ini memungkinkan CRU Indonesia memperluas perannya sebagai mitra terpercaya bagi lembaga pemerintah, pelaku sektor swasta, dan institusi akademik.

CRU Indonesia menjadi mitra strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, mendukung perbaikan tata kelola lahan dan penanganan tantangan terkait status kepemilikan. Organisasi ini juga bekerja sama erat dengan Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat di bawah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, berkontribusi pada inisiatif penyelesaian sengketa dan pengakuan hak-hak hutan adat.

Di tingkat internasional, CRU Indonesia bermitra dengan Proforest dan Earthworm Foundation melalui proyek Supporting Multi-Stakeholder

Action to Respect Indigenous Peoples and Local Communities' Land Rights di Provinsi Aceh. Kolaborasi ini meningkatkan visibilitas CRU Indonesia di kalangan pembeli besar Eropa, termasuk Unilever, PepsiCo, Nestlé, dan Mondelez. Proyek ini juga memfasilitasi kemitraan baru dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, memperkuat keterlibatan multi-pemangku kepentingan di tingkat lokal.

CRU Indonesia juga melanjutkan kemitraan program dengan Goodhope, khususnya dalam mendukung penanganan konflik lahan dan sumber daya alam serta penerapan Human Rights Due Diligence dalam operasi perusahaan.

Selain itu, CRU Indonesia membangun kerja sama strategis dengan Direktorat Organisasi Masyarakat di bawah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri. Kemitraan akademik juga diperluas melalui kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Bandung dan Universitas Katolik Atma Jaya di Jakarta, fokus pada penelitian, pengembangan kapasitas, dan kesempatan magang bagi mahasiswa.



Gambar 22. Pertemuan Mitra Strategis ATR/BPN.



Gambar 23. Pertemuan Pengembangan Program bersama PKTHA.



Gambar 24. Pertemuan Koordinasi dengan Para Pemberi Dana IPLC selama RSPO 2025 di Kuala Lumpur. Sesi Tanya Jawab



Gambar 25. Pertemuan Koordinasi dengan Para Pemberi Dana IPLC selama RSPO 2025 di Kuala Lumpur. Acara penutupan



Gambar 26. Smartseed yang diselenggarakan Sinarmas, Medan. Ginjar mempresentasikan program CRU Indonesia.



Gambar 27. Yosigara dan Tim Swisscontact di Forum Bisnis NDPE, Medan.



Pengembangan Organisasi

Pada tahun 2025, CRU Indonesia terus memperkuat fondasi organisasinya untuk mendukung peran sebagai fasilitator netral dan mitra teknis dalam penanganan konflik lahan dan sumber daya alam. Pengembangan organisasi difokuskan pada peningkatan tata kelola, penguatan sumber daya manusia, serta penguatan sistem kelembagaan agar organisasi tetap adaptif, akuntabel, dan mampu mendukung proses multi-pihak yang semakin kompleks.

Di tingkat tata kelola dan manajemen, CRU Indonesia melanjutkan penyempurnaan koordinasi internal, mekanisme pengambilan keputusan, dan perencanaan strategis untuk memastikan pelaksanaan program yang lebih efektif. Perbaikan ini diarahkan agar manajemen operasional selaras dengan arah strategis jangka panjang organisasi, khususnya dalam memperluas kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan mitra masyarakat sipil.

Pengembangan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama. Meski terbatasnya anggaran dan jumlah staf berdampak pada optimalisasi beberapa kegiatan, organisasi terus berinvestasi dalam peningkatan kapasitas staf, memperkuat kolaborasi internal, dan mempertahankan tim yang berdedikasi tinggi, mampu memfasilitasi proses penyelesaian konflik yang sensitif di berbagai konteks.

CRU Indonesia juga memperkuat sistem kelembagaan, termasuk manajemen program, dokumentasi, dan koordinasi kemitraan. Perbaikan ini mendukung manajemen pengetahuan yang lebih sistematis, memperkuat pembelajaran organisasi, serta memastikan kualitas dan kredibilitas layanan fasilitasi dan dukungan teknis CRU.

Tonggak penting pada 2025 adalah pengembangan berkelanjutan platform Yayasan NITI. Inisiatif ini dirancang untuk mendukung mekanisme pendanaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan bagi penyelesaian konflik dan tata kelola lahan kolaboratif. Melalui pembangunan platform ini, CRU Indonesia bertujuan memperluas peluang kemitraan jangka panjang dan pengaturan pendanaan inovatif yang dapat menjaga fasilitasi netral serta pendekatan sensitif-konflik dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, upaya penguatan organisasi ini penting untuk memastikan CRU Indonesia tetap tangguh, kredibel, dan responsif dalam mendukung solusi kolaboratif terhadap konflik lahan dan sumber daya alam di Indonesia.

Pemantauan, Pembelajaran, dan Refleksi

Sepanjang 2025, CRU Indonesia memperkuat pembelajaran organisasi melalui pemantauan rutin, refleksi internal, dan pengelolaan program yang adaptif. Pendekatan ini memungkinkan penilaian kemajuan, identifikasi kendala operasional, dan penyempurnaan strategi penyelesaian konflik dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam.

Salah satu pelajaran utama adalah bahwa penyelesaian konflik yang efektif membutuhkan legitimasi sosial dan kapasitas teknis yang kuat. Proses dialog dan mediasi lebih berhasil ketika fasilitator diakui sebagai pihak netral dan kredibel, sekaligus didukung oleh alat analisis yang solid, pendekatan berbasis bukti, dan keterampilan fasilitasi yang mumpuni. Fondasi ganda ini tetap menjadi inti peran CRU Indonesia sebagai convener yang dipercaya dalam konteks multi-pemangku kepentingan.

Pelajaran penting lainnya adalah nilai kolaborasi lintas sektor. Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal memperluas cakupan dan dampak inisiatif penyelesaian konflik. Platform kolaboratif memungkinkan pemangku kepentingan berbagi perspektif, menyelaraskan kepentingan, dan mengembangkan solusi yang lebih tahan lama dan diterima secara luas.

CRU Indonesia terus mengokohkan perannya sebagai fasilitator netral dan sumber daya teknis dalam penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam di Indonesia.

Di tingkat organisasi, pengalaman 2025 menegaskan pentingnya sistem internal yang kuat. Keterbatasan finansial dan staf memengaruhi kecepatan dan skala beberapa kegiatan, menekankan perlunya sistem operasional tangguh, kemitraan beragam, dan kapasitas institusional yang memadai untuk memastikan kelangsungan program.

Ke depan, CRU Indonesia berkomitmen menerjemahkan pelajaran ini menjadi perbaikan nyata, termasuk memperluas kolaborasi dengan mitra strategis, memperkuat manajemen internal, dan meningkatkan kapasitas institusional. Dengan pembelajaran berkelanjutan, CRU Indonesia terus mengokohkan perannya sebagai fasilitator netral dan sumber daya teknis dalam penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam di Indonesia.

Tantangan dan Tanggapan Adaptif

Pada tahun 2025, CRU Indonesia terus memperkuat perannya sebagai fasilitator netral dalam penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam, meski menghadapi berbagai keterbatasan organisasi. Tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya keuangan, yang memengaruhi skala dan kecepatan pelaksanaan program. Beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dijalankan sesuai desain awal, sementara kegiatan lain perlu disesuaikan agar tetap dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia.

Selain keterbatasan dana, kapasitas sumber daya manusia juga memengaruhi pelaksanaan program. Seiring meluasnya portofolio dan jaringan kemitraan CRU, kebutuhan akan keahlian teknis, kemampuan fasilitasi, dan manajemen program meningkat. Menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan tim yang relatif kecil menuntut prioritas yang cermat dan alokasi waktu serta keahlian staf secara efisien.

Kondisi ini mendorong CRU Indonesia untuk memperjelas prioritas programnya, dengan fokus pada inisiatif yang memberikan nilai strategis terbesar—khususnya yang memperkuat pendekatan sensitif terhadap konflik dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam serta menegaskan peran CRU sebagai platform terpercaya bagi berbagai pemangku kepentingan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, CRU Indonesia menerapkan beberapa strategi organisasi. Pertama, organisasi memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kemitraan ini membantu memperluas jangkauan CRU sambil mempertahankan kualitas pendekatan berbasis dialog dan bukti.

Kedua, CRU memperkuat posisi kelembagaan dan mengeksplorasi peluang untuk memperluas basis dukungan melalui kemitraan strategis dan pengembangan program. Upaya ini mencakup penguatan jaringan kolaborasi dan ekosistem kelembagaan yang mendukung CRU serta inisiatif afiliasinya.

Melalui langkah-langkah adaptif ini, CRU Indonesia berhasil mempertahankan kesinambungan program dan terus berkontribusi pada tata kelola lahan dan sumber daya alam yang lebih inklusif, kolaboratif, dan sensitif terhadap konflik di Indonesia. Meskipun keterbatasan sumber daya tetap menjadi tantangan, hal ini juga mendorong organisasi untuk berinovasi, memprioritaskan secara strategis, dan memperdalam kemitraan demi keberlanjutan dampak jangka panjangnya.

Gambaran Umum Keuangan

Pada tahun 2025, CRU Indonesia mempertahankan pendekatan pengelolaan keuangan yang hati-hati dan akuntabel untuk mendukung misinya memperkuat tata kelola sumber daya alam dan lahan yang sensitif terhadap konflik. Sumber daya keuangan organisasi terutama berasal dari dua aliran utama: hibah berbasis program dan pendapatan layanan melalui kegiatan penguatan kapasitas.

Sebagian besar pendanaan CRU Indonesia diperoleh dari program kolaboratif yang dijalankan bersama Proforest dan Earthworm Foundation, dengan dukungan empat pembeli besar Eropa—Unilever, PepsiCo, Nestlé, dan Mondelez—yang berkomitmen memperkuat rantai pasok yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Melalui kemitraan ini, CRU Indonesia berkontribusi pada pengembangan pendekatan sensitif konflik terkait kepastian hak atas lahan dan keterlibatan pemangku kepentingan, terutama di wilayah dengan klaim lahan tumpang tindih dan risiko sosial yang tinggi. Dukungan dari inisiatif keberlanjutan berbasis perusahaan ini memungkinkan CRU Indonesia memfasilitasi proses dialog, memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan, serta memberikan bantuan teknis dalam menangani konflik lahan dan sumber daya alam.

Selain hibah, CRU Indonesia juga memperoleh pendapatan institusional melalui penyelenggaraan empat program pelatihan HRDD sepanjang tahun. Pelatihan ini ditujukan bagi praktisi sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lain yang ingin memperkuat pemahaman tentang manajemen risiko hak asasi manusia di sektor berbasis lahan, seperti kehutanan dan pertanian. Kegiatan pelatihan tidak hanya mendukung keberlanjutan organisasi, tetapi juga sejalan dengan tujuan CRU Indonesia untuk mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan operasi yang sensitif terhadap konflik.

Dari sisi pengeluaran, CRU Indonesia tetap memprioritaskan pelaksanaan program sambil mempertahankan kapasitas operasional esensial. Sebagian besar sumber daya keuangan dialokasikan untuk kegiatan program, termasuk proses keterlibatan pemangku kepentingan, pelaksanaan pelatihan, dokumentasi perspektif lapangan, dan fasilitasi dialog multi-pemangku kepentingan. Pengeluaran operasional—meliputi manajemen organisasi, fungsi administrasi, dan pengembangan institusi—dipertahankan pada tingkat proporsional untuk menjamin efisiensi sekaligus mempertahankan kualitas dan keandalan pelaksanaan program.

Sepanjang 2025, CRU Indonesia menegakkan prinsip akuntabilitas keuangan, transparansi, dan pengelolaan sumber daya donor secara bertanggung jawab. Proses pengelolaan keuangan dipandu oleh mekanisme pengendalian internal, prosedur pelaporan yang jelas, dan kepatuhan terhadap persyaratan donor. Pemantauan dan dokumentasi keuangan secara rutin memastikan sumber daya digunakan secara efektif dan selaras dengan tujuan program yang disepakati.

Meski beroperasi dalam kondisi keterbatasan keuangan dan kapasitas staf—tantangan umum bagi organisasi yang berorientasi misi—CRU Indonesia terus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mempertahankan program inti dan kemitraannya. Organisasi tetap berkomitmen memperkuat ketahanan keuangan melalui perluasan kolaborasi strategis, diversifikasi sumber pendanaan, dan pemeliharaan standar akuntabilitas yang ketat. Upaya ini memastikan pengelolaan keuangan CRU Indonesia terus mendukung inisiatif penyelesaian konflik di sektor lahan dan sumber daya alam di Indonesia yang berdampak, kredibel, dan berkelanjutan.

Prospek Strategis 2026

Menatap 2026, CRU Indonesia akan fokus pada perluasan jangkauan program, penguatan kemitraan strategis, dan penguatan keberlanjutan kelembagaan untuk meningkatkan kontribusinya dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam yang adil serta sensitif terhadap konflik di Indonesia. Pelajaran dari 2025—termasuk keterbatasan anggaran dan SDM yang memengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan—menjadi dasar strategi yang lebih terfokus, dengan tujuan meningkatkan ketahanan operasional sekaligus memperluas dampak melalui kolaborasi dan investasi strategis.

Prioritas utama 2026 adalah memperluas cakupan geografis keterlibatan CRU Indonesia. Di Provinsi Aceh, CRU Indonesia akan melanjutkan kerja sama dengan Proforest dan Earthworm Foundation untuk mengembangkan pendekatan ekosistem sensitif-konflik dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam. Kegiatan ini mencakup penyempurnaan dan pengelolaan Peta Indikatif Rawan Konflik (PIRK), alat strategis untuk mengidentifikasi dan memantau risiko konflik terkait hak atas tanah serta mendukung respons preventif berbasis bukti.

Di luar Aceh, CRU Indonesia akan memperluas kegiatan ke Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur melalui kerja sama dengan Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Kehutanan. Didukung oleh hibah Ford Foundation Indonesia, inisiatif ini bertujuan memperkuat respons desentralisasi terhadap konflik tenurial dengan membangun kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten serta mengembangkan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan inklusif. Mekanisme ini akan melibatkan aktif Masyarakat Adat dan komunitas lokal agar proses penyelesaian konflik bersifat partisipatif, transparan, dan berakar pada konteks lokal.

CRU Indonesia juga akan memperdalam kemitraan strategis lintas sektor untuk mendorong solusi kolaboratif terkait keamanan tenurial dan tata kelola lahan yang bertanggung jawab. Di tingkat lokal, organisasi akan mendukung pengembangan Multi-Stakeholder Forums (MSF) di Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Selatan.

Forum ini bertujuan memfasilitasi dialog antara pemerintah, perusahaan, Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong respons kolektif terhadap konflik lahan dan sumber daya.

Keterlibatan dengan sektor swasta juga akan diperluas, khususnya dalam mendukung penerapan Human Rights Due Diligence (HRDD) di sektor perkebunan dan sumber daya alam. Kolaborasi yang direncanakan mencakup perusahaan dan inisiatif industri seperti Golden Agri-Resources, Evans Group, Goodhope Asia Holdings, dan Indonesia Growers Collaboration. Melalui kemitraan ini, CRU Indonesia bertujuan mendukung pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani risiko hak asasi manusia serta konflik tenurial di operasi dan rantai pasok perusahaan.

Kemitraan akademik juga akan diperkuat untuk mendukung produksi pengetahuan dan keterlibatan kebijakan. Selain melanjutkan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, serta International Association for the Study of the Commons, CRU Indonesia akan memperluas keterlibatan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Katolik Parahyangan dan Pusat Riset Hukum Islam dan Adat (PRHIA) Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh.

Akhirnya, CRU Indonesia akan memprioritaskan keberlanjutan kelembagaan dan ketahanan finansial jangka panjang. Langkah penting adalah pendirian Yayasan Nidi Cita Prashanti (Yayasan NITI), lembaga pengelola dana abadi yang menyediakan mekanisme pendanaan independen dan berkelanjutan untuk mendukung peran CRU Indonesia sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang netral dan tidak memihak. Secara paralel, organisasi akan terus mengeksplorasi peluang hibah proyek yang beragam, mempersiapkan regenerasi kepemimpinan, serta memperkuat kapasitas tim eksekutif.

Melalui prioritas strategis ini, CRU Indonesia berupaya memperkuat perannya sebagai fasilitator tepercaya untuk dialog, kolaborasi, dan tata kelola lahan serta sumber daya alam yang sensitif terhadap konflik di Indonesia.



Ucapan Terima Kasih

CRU Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada berbagai mitra, institusi, dan individu yang komitmen serta kolaborasinya telah memungkinkan seluruh kegiatan kami sepanjang 2025. Kemajuan yang tercermin dalam Laporan Tahunan ini merupakan hasil kerja kolektif untuk memperkuat tata kelola lahan dan sumber daya alam yang inklusif dan sensitif terhadap konflik, khususnya di wilayah di mana ketidakpastian hak atas tanah dan kepentingan penggunaan lahan yang bersaing terus memengaruhi masyarakat, pemerintah lokal, dan dunia usaha.

Kami sangat berterima kasih atas dukungan para mitra donor—Unilever, PepsiCo, Nestlé, dan Mondelez International. Komitmen mereka terhadap rantai pasok yang bertanggung jawab dan tata kelola lahan yang berkelanjutan telah memungkinkan CRU Indonesia memfasilitasi dialog, memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan, dan mengembangkan pendekatan praktis untuk menghadapi tantangan terkait kepemilikan lahan, terutama di wilayah yang terkait dengan produksi komoditas pertanian.

Kami juga mengapresiasi kemitraan berharga dari mitra pelaksana, termasuk Proforest dan Earthworm Foundation, serta organisasi masyarakat sipil lokal yang bekerja di Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Bersama-sama, mitra-mitra ini berperan penting dalam mendokumentasikan berbagai perspektif pemangku kepentingan terkait keamanan hak atas tanah dan memfasilitasi pengembangan kerangka PIRK (Peta Indikatif Rawan Konflik). Pengetahuan lokal, keberadaan di lapangan, dan komitmen mereka terhadap keterlibatan inklusif memperkaya proses dialog dan memastikan suara masyarakat terdampak tercermin dengan bermakna.

CRU Indonesia juga berterima kasih kepada mitra pemerintah yang secara aktif terlibat dalam upaya kolaboratif ini, termasuk Direktorat PKTHA, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan; Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Keterbukaan mereka terhadap dialog dan kesediaan untuk terlibat dalam diskusi multi-pemangku kepentingan sangat penting dalam mendorong pendekatan konstruktif terhadap keamanan hak atas tanah dan pencegahan konflik.

Penghormatan mendalam kami sampaikan kepada masyarakat adat dan komunitas lokal di wilayah ini, yang pengalaman, wawasan, dan partisipasinya menjadi fondasi dari inisiatif ini. Kesediaan mereka berbagi perspektif mengenai keamanan hak atas tanah dan realitas komunitas secara signifikan memperkuat pemahaman kolektif mengenai tantangan dan peluang penyelesaian bersama.

Kami juga menghargai partisipasi pelaku sektor swasta, termasuk Goodhope, Golden Agri-Resources, dan Astra Agro Lestari. Keterlibatan mereka menunjukkan pentingnya dialog konstruktif antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah dalam menangani risiko terkait hak atas tanah dan mendukung pengelolaan lahan yang bertanggung jawab.

Di internal CRU Indonesia, keberhasilan ini tidak lepas dari dedikasi tim kami—Rinawati Eko Pamuji Lestari, Beatrice M. Mailoa, Ginanjar Tamimy, Ilya M. Moeliono, Agwina Dieta Sadikin, Yosigara Prihandika, Hatma Nova Kartikasara, dan Muhammad Yovi—yang profesionalisme dan kegigihannya memastikan proses dialog, dokumentasi, dan fasilitasi berjalan efektif.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 54 anggota CRU Indonesia yang aktif berkontribusi dalam pertukaran pengetahuan dan pembelajaran kolektif melalui jaringan anggota CRU Indonesia, termasuk keterlibatan rutin di platform komunikasi organisasi. Kontribusi mereka





Lampiran

Lampiran 1. Daftar Kegiatan Tahun 2025

Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1. Pelatihan HRDD – Pengenalan terhadap Prinsip-Prinsip Panduan PBB (UNGPs) dan Kerangka Kerja OECD	Bandung	Pelatihan berbayar
2. Pelatihan Penerapan HRDD untuk PT. Astra Agro Lestari (AAL)	Jakarta	Pelatihan internal
3. Pelatihan HRDD – Pengenalan terhadap Prinsip-Prinsip Panduan PBB (UNGPs) dan Kerangka Kerja OECD	Jakarta	Pelatihan untuk anggota Palm Oil Collaboration Group (POCG)
4. Asesmen Perspektif Para Pemangku Kepentingan tentang Keamanan Tenurial	Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, Aceh	Kerja sama dengan Proforest dan Earthworm Foundation
5. Dialog multipihak mengenai keamanan tenurial bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal (IPLC)	Kota Subulussalam, Aceh	Kerja sama dengan Proforest dan Earthworm Foundation
6. Pelatihan Peka Konflik untuk IPLC, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil	Balige, Sumatera Utara	Kerja sama dengan Proforest dan Earthworm Foundation
7. Peningkatan kapasitas bagi pemegang	Bogor	Kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Bandung) dan Universitas Atma Jaya (Jakarta)
8. Asesmen dan pemetaan konflik serta kerawanan konflik yang berkaitan dengan lahan dan sumber daya alam di Provinsi Aceh	Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Timur	Kerja sama dengan Proforest dan Earthworm Foundation
9. Pelatihan Mediator Bersertifikat MA untuk IPLC, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil	Dolok Sanggul, Sumatera Utara	Bekerja sama dengan P4M melalui proyek IPLC (Proforest dan Earthworm Foundation)
10. Pengembangan Peta Indikatif Rawan Konflik di Provinsi Aceh	Bogor	Kerja sama dengan Proforest dan Earthworm Foundation
11. Koordinasi dengan Mitra Strategis Kementerian ATR/BPN	Jakarta	Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN
12. Pengembangan program bersama terkait desentralisasi respon dan penanganan konflik penguasaan tanah yang akan diajukan kepada Ford Foundation Indonesia	Bogor, Jakarta	Bekerja sama dengan Direktorat Penanganan Konflik Penguasaan Tanah dan Hutan Adat (PKTHA), Kementerian Kehutanan
13. Rapat Koordinasi Proyek IPLC dengan Para Penyanggah Dana	Kuala Lumpur, Malaysia	Kerja sama dengan Proforest dan Earthworm Foundation
14. Pelatihan HRDD dan Mekanisme Penyelesaian Keluhan	Bandung	Pelatihan berbayar
15. Pelatihan Analisis, Dokumentasi, dan Pelaporan Konflik bagi Staf Perusahaan Kelapa Sawit	Bogor	Kerja sama dengan Proforest dan Earthworm Foundation
16. Pelatihan Lanjutan tentang Penilaian dan Mediasi Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, pejabat pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil	Dolok Sanggul, Sumatera Utara	Kerja sama dengan Proforest dan Earthworm Foundation
17. Penyusunan Pedoman Penggunaan PIRK	Bogor	Kerja sama dengan Proforest dan Earthworm Foundation
18. Diseminasi PIRK	Tapaktuan, Kota Subulussalam, dan Kutacane	Kerja sama dengan Proforest dan Earthworm Foundation

Lampiran 2. Laporan Keuangan

CRU INDONESIA

Laporan Aktivitas

(Dalam Rupiah)

2024

2025

Penerimaan

Kontribusi	505.457.000	2.171.887.960
Iuran Anggota	9.300.000	4.050.000
Lain-lain	9.312.873	154.352.500

Jumlah penerimaan

524.069.873 **2.330.290.460**

Pengeluaran

Biaya Program	461.599.612	2.278.423.508
Biaya Administrasi dan Umum	1.867.500	1.751.494

Jumlah pengeluaran

463.467.112 **2.280.175.002**

Surplus (Defisit)

60.602.761 **50.115.458**



CRU berupaya memperbaiki iklim investasi dan daya saing daerah, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat

📍 Jl. Danau Sentani no. 6-7
Duta Pakuan, Bogor Tengah
Kota Bogor, Jawa Barat 16129
Indonesia

🌐 <https://conflictresolutionunit.id>

📷 [cruindonesia](#)